BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut Sadono Sukirno (2011:192) adalah sebagai berikut:

> "Pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi".

Sedangkan pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut Sadono Sukirno (2011:61) adalah sebagai berikut:

> "Pengeluaran (Perbelanjaan) pemerintah adalah perbelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa".

Kemudian pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut Hera Susanti (2000:69) adalah sebagai berikut:

> "Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak".

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah terhadap barang dan jasa.

2.1.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suminto (2004:26) format baru belanja negara adalah sebagai berikut:

I. Belanja Pemerintah Pusat

Pengertian Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 11 adalah sebagai berikut:

> "Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain".

Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Pengertian Belanja Pegawai menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:

> "Belanja pegawai menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial). Dalam klasifikasi tersebut termasuk pula belanja gaji/upah proyek yang selama ini diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan. Dengan format ini, maka akan terlihat pos yang tumpang tindih antara belanja pegawai yang diklasifikasikan sebagai rutin dan pembangunan. Di sinilah nantinya efisiensi akan bisa diraih".

Sedangkan pengertian Belanja Pegawai menurut Sri Lestari (2011:4) adalah sebagai berikut:

> "Belanja pegawai yaitu mencakup seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan belanja pegawai transito, pensiun serta asuransi kesehatan".

b. Belanja Barang

Pengertian Belanja Barang menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:

> "Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan".

Sedangkan pengertian Belanja Barang menurut Sri Lestari (2011:4) adalah sebagai berikut:

> "Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa".

c. Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas belanja modal asset tetap/fisik dan belanja modal aset lainnya/non-fisik. Dalam prakteknya selama ini belanja lainnya non fisik secara mayoritas terdiri dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi untuk pembangunan".

d. Pembayaran Bunga Utang

Pengertian Pembayaran Bunga Utang menurut Sri Lestari (2011:4) adalah sebagai berikut:

> "Pembayaran bunga utang yaitu meliputi utang dalam negeri dan utang luar negeri".

e. Subsidi

Pengertian Subsidi menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:

> "Subsidi menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam rangka menjaga stabilitas harga agar dapat terjangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat. Subsidi tersebut dialokasikan melalui perusahaan negara dan perusahaan swasta".

f. Belanja Hibah

Pengertian Belanja Hibah berdasarkan Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13/2006 Pasal 42 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

> "Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan".

Sedangkan pengertian Belanja Hibah menurut Sri Lestari (2011:5) adalah sebagai berikut:

> "Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang atau barang atau jasa dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan instansi lainnya yang tidak perlu dibayar kembali, sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat".

g. Bantuan Sosial

Pengertian Bantuan Sosial menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:

> "Bantuan sosial menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial".

Sedangkan pengertian Bantuan Sosial menurut Sri Lestari (2011:5) adalah sebagai berikut:

> "Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial, yaitu berupa bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial".

h. Belanja Lain-lain

Pengertian Belanja Lain-lain berdasarkan Buletin Teknis No. 04 Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah adalah sebagai berikut:

> "Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah".

Sedangkan pengertian Belanja Lain-lain menurut Sri Lestari (2011:5) adalah sebagai berikut:

> "Belanja lain-lain adalah merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat mendesak dan belum terprogram, terprogram, belanja penunjang, dan cadangan".

II. Belanja Untuk Daerah

Pengertian Belanja Untuk Daerah menurut Suminto (2004:27) adalah sebagai berikut:

> "Belanja untuk daerah menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah".

Sedangkan pengertian Belanja Untuk Daerah menurut Suminto (2004:26) adalah sebagai beikut:

> "Belanja untuk daerah, sebagaimana yang berlaku selama ini terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian".

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Sadono Sukirno (2011:9) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah".

Sedangkan pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznet yang dikutip oleh Todaro (2003:99) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya".

Kemudian pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Arsyad (2004:13) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk ataupun dari adanya perubahan struktur ekonomi".

Lalu pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznet yang dikutip oleh Suryana (2000:61) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat".

Adapun juga pengertian menurut Kuznets yang dikutip oleh Jhingan (2000:57) adalah sebagai berikut:

> "Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan Produk Domestik Bruto riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

2.1.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Imamul & Gina (2009:11) mengatakan bahwa:

> "Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB)".

Beberapa alasan digunakannya Produk Domestik Bruto (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

a. Produk Domestik Bruto dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal

ini, peningkatan Produk Domestik Bruto mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

b. Produk Domestik Bruto dihitung atas dasar konsep siklus aliran (*circulair flow concept*). Artinya, perhitungan Produk Domestik Bruto mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung Produk Domestik Bruto memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

c. Batas wilayah perhitungan Produk Domestik Bruto adalah negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Pengertian Produk Domestik Bruto menurut McEachern dalam Sigit Triandaru (2000:146) adalah sebagai berikut:

> "Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Produk Domestik Bruto juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat".

Sedangkan pengertian Produk Domestik Bruto menurut Mankiw (2006:19) adalah sebagai berikut:

> "Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu".

Kemudian pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sadono Sukirno (2011:35) adalah sebagai berikut:

> "Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing".

Lalu pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2004:17) adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu".

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. Produk Domestik Bruto ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi Produk Domestik Bruto sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Karena begitu pentingnya peran Produk Domestik Bruto di dalam suatu perekonomian, maka perlu kiranya untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto.

Faktor baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto menurut teori Keynes, Produk Domestik Bruto terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut

adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor neto (NX).

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2003:1) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Sedangkan pengertian Penerimaan Pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2001:155) pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.1.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan sektor pajak antara lain :

I. Pendapatan pajak dalam negeri

1. Pendapatan pajak penghasilan (PPh)

a. Pendapatan PPh migas :

- Pendapatan PPh Minyak Bumi
- Pendapatan PPh Gas Alam
- Pendapatan PPh lainnya dari Minyak Bumi
- Pendapatan PPh Migas lainnya

b. Pendapatan PPh non Migas :

- Pendapatan PPh pasal 21
- Pendapatan PPh pasal 22
- Pendapatan PPh pasal 22 Impor
- Pendapatan PPh pasal 23
- Pendapatan PPh pasal 25/29 orang pribadi
- Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan
- Pendapatan PPh pasal 26
- Pendapatan PPh Final
- Pendapatan Denda Administrasi Cukai

- Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   a. Pendapatan PPN

   - PPN Dalam Negeri
   - Pendapatan PPN Impor
   - Pendapatan PPN lainnya

   b. Pendapatan PPnBm

   - Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
   - Pendapatan PPnBM Impor
   - Pendapatan PPnBM lainnya

3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

   - Pendapatan PBB pedesaan
   - Pendapatan PBB Perkotaan
   - Pendapatan PBB Perkebunan
   - Pendapatan PBB Kehutanan
   - Pendapatan PBB Pertambangan
   - Pendapatan PBB lainnya

4. Pendapatan BPHTB

5. Pendapatan Cukai

   - Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
   - Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
   - Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
   - Pendapatan Cukai Lainnya

6. Pendapatan Pajak Lainnya

- Pendapatan Bea Materai
- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

7. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

- Pendapatan Bunga Penagihan PPh
- Pendapatan Bunga Penagihan PPN
- Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
- Pendapatan Bunga Penagihan PTLL

II. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

1. Pendapatan Bea Masuk

- Pendapatan Bea Masuk
- Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas hibah (SPM nihil)
- Pendapatan Denda Administrasi Pabean
- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
- Pendapatan Pabean lainnya

2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

I. Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74) adalah sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Erly Suandy (2006:81) adalah sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".

Kemudian pengertian Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2009:129) adalah sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak".

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut:

> "Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri".

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2002:226) adalah sebagai berikut:

> "Pajak pertambahan nilai dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dikenakan atau diserahkan oleh (PKP) apakah ia pabrikan, importer, agen utama/distributor utama".

3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Waluyo (2010:196) adalah sebagai berikut:

> "Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang".

Sedangkan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

> "Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan".

4. Pendapatan BPHTB

Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut John Hutagaol (2007:237) adalah sebagai berikut:

> "Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan".

Sedangkan pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menurut Mardiasmo (2002:290) adalah sebagai berikut:

> "Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan".

5. Pendapatan Cukai

Pengertian Pendapatan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Cukai terdiri dari Pendapatan Cukai Hasil Tembakau, Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol, Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol, Pendapatan Cukai Lainnya".

6. Pendapatan Pajak Lainnya

Pengertian Pendapatan Pajak Lainnya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Pendapatan Bea Materai, Pendapatan dari Penjualan Benda Materai, Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya".

7. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

Pengertian Pendapatan Bunga Penagihan Pajak berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Bunga Penagihan Pajak terdiri dari Pendapatan Bunga Penagihan PPh, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM, Pendapatan Bunga Penagihan PTLL".

II. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pengertian Perdagangan Internasional menurut Sobri (2000) adalah sebagai berikut:

> "Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan".

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari:

1. Pendapatan Bea Masuk

Pengertian Bea Masuk berdasarkan UU No. 17/2006 perubahan dari UU No. 10/1995 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

> "Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor".

2. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

Pengertian Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu adalah sebagai berikut:

"Pendapatan pajak/pungutan ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu".

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Keterkaitan Antar Variabel	Kesimpulan Jurnal	Sumber Jurnal
1	X_2 ⟶ Y	Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan penerimaan perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas tenaga kerja, peningkatan gaji dan upah akan meningkatkan konsumsi.	Jurnal Media Riset Akuntansi, Audlting dan Informasi Vol.7 No.1, April: 83 – 105 (Herman, 2007)
2	X_2 ⟶ Y	Dari hasil analisis data panel terhadap 31 Kanwil DJP seluruh Indonesia diketahui bahwa fluktuasi variabel TEWS berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak di Kanwil Khusus, Kanwil WP Besar 1 dan 2, Kanwil Jakarta Selatan dan Kanwil Jakarta Pusat.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No. 1, Juni Pengaruh Economic Shock Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Pajak Di Indonesia (Eddi Wahyudi dkk, 2009)
3	X_1 ⟶ X_2	Ram mengatakan bahwa mengenai hubungan antara besarnya pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap 115 negara maju dan berkembang mendapatkan bahwa meskipun sulit untuk disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek positif terhadap kondisi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Peranan Sektor Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta Kinerja, Volume 8, No.2,:Hal.133-147 (Siti Aisyah Tri Rahayu, 2004)
4	X_1 ⟶ Y	Dalam penelitian Abu N.M. Wahid (2008) berjudul An Empirical Investigation on the Nexus between Tax Revenue and Government Spending: The Case of Turkey mengatakan bahwa the results	Journal An Empirical Investigation on the Nexus between Tax Revenue and Government Spending: The Case of Turkey (Abu N.M. Wahid, 2008)

		support the hypothesis that government expenditure causes tax revenues to increase in Turkey. (Hasil mendukung hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pajak untuk meningkatkan pendapatan di Turki).	
5	X_1 ⟶ X_2	The results obtained based on regressions and panel techniques suggest that government spending is positively related with economic growth in the European Union countries. (Hasil yang diperoleh berdasarkan regresi dan teknik panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Uni Eropa)	Journal Government Spending and economic growth in the European union Countries :An empirical Approach (Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García,2006)
6	X_1 ⟶ X_2	Disisi yang lain Ram (1986) dan Grossman (1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat pengeluaran per sektor.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 No.1 April Hal 27-36 Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Jamzani Sodik, 2007)
7	X_2 ⟶ Y	This study inspects the relationship between tax revenue and the rate of economic growth for Pakistan (Studi ini memeriksa hubungan antara penerimaan pajak dan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk Pakistan)	Journal Tax Revenue and Economic Growth An Empirical Analysis For Pakistan (Mashhod Maskor at al, 2010)
8	X_1 ⟶ X_2	Pengeluaran pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan ekonomi Indonesia	Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol.8 No,1 Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Era Orde Baru dan Era Reformasi (Budi Indrawati, SE, MM, 2007)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menurut Tulus Tambunan (2011:254) adalah sebagai berikut:

> "Pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia".

Sedangkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menurut Siti Farida (2011:75) adalah sebagai berikut:

> "Perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada pengeluaran konsumsi terutama pada konsumsi pemerintah. Setelah masa krisis ekonomi terlihat bahwa konsumsi merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia".

Kemudian hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi menurut McEachern dalam Sigit Triandaru (2000:183) adalah:

> "Fungsi belanja pemerintah menghubungkan belanja pemerintah dan tingkat pendapatan dalam perekonomian".

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Patnasari dalam Siti Aisyah (2004) menyimpulkan bahwa:

> "Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah selama ini mempunyai pengaruh yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode diamati (1969-1997)".

Sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Ram (1986) dan Grossman (1988) dalam Jamzani Sodik (2007) mengatakan bahwa:

> "Terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat pengeluaran per sektor".

Kemudian pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Marta and Santiago (2006) mengatakan bahwa:

> "Hasil yang diperoleh berdasarkan regresi dan teknik panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Uni Eropa. *(The results obtained based on regressions and panel techniques suggest that government spending is positively related with economic growth in the European Union countries)"*.

Kemudian pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Jiranyakul (2007) mengatakan bahwa:

> "Dengan menggunakan *Granger* hanya terdapat hubungan satu arah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Thailand yaitu kenaikan pengeluaran pemerintah yang menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dengan menggunakan metode OLS, menunjukan bahwa antara kedua variabel berhubungan positif selama periode penelitian".

Lalu pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Antonio Estache (2007) mengatakan bahwa:

> "Ukuran pemerintah yang diwujudkan dengan pengeluaran pemerintah pada sektor publik dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya penelitian ini yang mengkaji tentang pengeluaran pemerintah disektor publik yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi".

Selanjutnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Lin (1994) mengatakan bahwa:

"Pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi".

Adapun juga pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Taufiq Dawood (2008) mengatakan bahwa:

"Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain faktor penduduk adalah faktor pengeluaran pemerintah".

2.2.2 Keterkaitan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Penerimaan Pajak

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak menurut Sadono Sukirno (2004:186) adalah sebagai berikut:

> "Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah pajak yang diramalkan. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan".

Sedangkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak menurut Waluyo (2007:6) adalah sebagai berikut:

"Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah".

Kemudian hubungan pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak menurut Mankiw (2006:87) adalah sebagai berikut:

> "Pemerintah bisa mendanai pengeluarannya dalam 3 cara, yaitu pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang."

Selanjutnya hubungan pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak menurut Narayan (2005:148) adalah sebagai berikut:

"Pengeluaran pemerintah meningkatkan penerimaan pemerintah".

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak menurut Abu N.M. Wahid (2008) mengatakan bahwa:

> "Hasil mendukung hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pajak untuk meningkatkan pendapatan di Turki. *(The results support the hypothesis that government expenditure causes tax revenues to increase in Turkey)"*.

Sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak menurut Deloughy (1999) mengatakan bahwa:

> "Perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan perubahan penerimaan pemerintah".

Kemudian pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak menurut Hondroyiannis dan Papapetrou (1999) mengatakan bahwa:

> "Terdapat kausalitas satu arah dari pengeluaran terhadap penerimaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pada tingkat yang tinggi di Yunani selama perpanjangan periode waktu, utamanya pada anggaran pengeluaran dan tidak pada dinamika dari penerimaan pemerintah. Tingginya tingkat penggunaan kebijakan fiskal yang ekspansioner untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan berbagai peristiwa politik adalah faktor-faktor khusus yang menandai tumbuhnya sektor publik di Yunani".

Lalu pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak Menurut Mithani dan Khoon (1999) mengatakan bahwa:

> "Terdapat kausalitas satu arah dari pengeluaran terhadap penerimaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik di Malaysia lebih dipengaruhi oleh anggaran pengeluaran pemerintah. Hal ini disebabkan berbagai faktor di antaranya tingkat bunga yang relatif rendah, meningkatnya pendapatan sektor pemerintahan dan swasta sebagai akibat

dari kebijakan-kebijakan ekonomi terdahulu, akses terhadap kredit yang lebih luas, dan kebijakan fiskal yang ekspansioner".

Selanjutnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak menurut Cheng (1999) mengatakan bahwa:

"Terdapat kausalitas dua arah *(feedback)* di negara Chile, Panama, Brazil dan Peru. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi".

2.2.3 Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak menurut McConnell dalam Herman (2007:7) adalah sebagai berikut:

"Terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak".

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Herman (2007) mengatakan bahwa:

"Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan penerimaan perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas tenaga kerja, peningkatan gaji dan upah akan meningkatkan konsumsi".

Sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Roshaiza Taha dkk (2011) menyatakan bahwa:

"Perubahan pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu menaikan penerimaan pajak".

Kemudian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Pandiangan (2001) mengatakan bahwa:

> "Terdapat hubungan positif antara penerimaan pajak pertambahan nilai dengan Produk Domestik Bruto".

Lalu menurut Eddi Wahyudi dkk (2009) mengatakan bahwa:

> "Dari hasil analisis data panel terhadap 31 Kanwil DJP seluruh Indonesia diketahui bahwa fluktuasi variabel TEWS berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak di Kanwil Khusus, Kanwil WP Besar 1 dan 2, Kanwil Jakarta Selatan dan Kanwil Jakarta Pusat".

Selanjutnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Hatta Rajasa (2010) dalam Koran Kompas menyatakan bahwa:

> "Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, jika ekonomi meningkat, tentu pajak akan meningkat".

Kemudian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Purnama (2006) mengatakan bahwa:

> "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak dan menambah lapangan kerja".

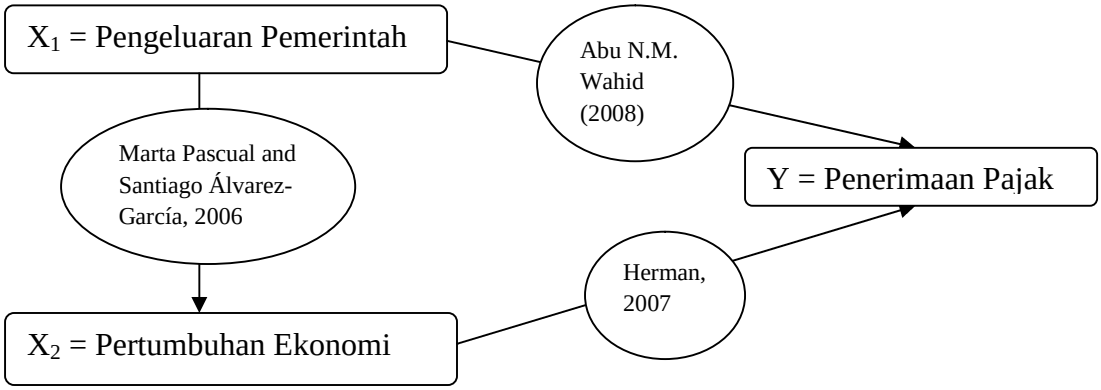
Lalu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Sri Mulyani (2010) dalam Harian Ekonomi Neraca menyatakan bahwa:

> "Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada penerimaan perpajakan, namun pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan perpajakan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi".

Selanjutnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak menurut Eddi Wahyudi dkk (2006) menyatakan bahwa:

> "Fluktuasi ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak".

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2006:70) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Penerimaan Pajak.